

**PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN BERBASIS VALUE
FOR MONEY DI PKBI BANTUL**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

Nama : Uber Meilawati
Nomor Mahasiswa : 144215220
Jurusan : Akuntansi
Bidang Konsentrasi : Akuntansi Keuangan

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA
YOGYAKARTA**

2019

HALAMAN PENGESAHAN

**Dipertahankan di Depan Panitia Penguji Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya
Wiwaha Yogyakarta dan Diterima Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**

Pada Tanggal :

02 April 2019

Panitia Penguji

Ketua

Dra. Sulastiningsih, M. Si

1. Anggota

2. Anggota

Drs. Achmad Tjahjono, MM. Akt

H. Zulkifli, SE. MM

Mengesahkan

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi

Widya Wiwaha Yogyakarta

Ketua

Drs. Muhammad Subkhan, M

**HALAMAN PENGESAHAN UJIAN
SKRIPSI
PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN BERBASIS VALUE
FOR MONEY DI PKBI BANTUL**

Disusun Oleh :

**Nama : Uber Meilawati
No. Mahasiswa : 144215220
Jurusan : Akuntansi**

Yogyakarta, 28 Maret 2019

**Telah disetujui dan disahkan oleh
Dosen Pembimbing**

Dra. Sulastiningsih, M. Si

HALAMAN PERSEMBAHAN

Sujud syukurku kusembahkan kepadaM uya Allah, Tuhan Yang Maha Agung dan Maha Tinggi. Atas takdirMu saya bisa menjadi pribadi yang berfikir, berilmu, beriman, dan bersabar.

Semoga keberhasilan ini menjadi salah satu langkah awal untuk masa dep anku, dalam meraih cita-cita.

Dengan ini saya persembahkan skripsi ini untuk,

Tuhan Yang MahaEsa yang telah memberikan rahmat dan hidayahNy asehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dan studi saya.

Terima kasih untukkedua orang tuaku tercinta yang telah membesarkanku dengan penuh kasih dan sayang hingga saya sudah sebesar ini, serta member dukungan, perjuangan, motivasi, pengorbanan dalam hidup ini dan dengan tulus memberikan doa hingga melebihi segala materi yang pernah ada di dunia.

Terima kasih untuksuamiku tercinta Bagus Aldrian atas perhatian, dan kesabarannya yangtelah luar biasa dalam memberi doa, dukungan, semangat dan inspirasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Dra. Sulastiningsih, M. Si selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar dan banyakmembantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih untuk semua teman-teman Akuntansi 2014 STIE WIDYA WIWAHA dan segenap pihak yang penulis tidak bisa sebutkan satu per satu.

Terima kasih untuk Almamaterku.

KATA PENGANTAR

Puji sukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia yang dilimpahkan-Nya sehingga skripsi dengan judul “Evaluasi Pengelolaan Dana Keuangan di Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Kabupaten Bantul Pada Tahun 2017” dapat terselesaikan. Untuk itu penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan berupa arahan dan dorongan selama penulis menempuh studi di STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta yang telah memberikan kepercayaan dan kesempatan untuk menempuh pendidikan Strata 1.
2. Kepala Program Studi Akuntansi yang memberikan segala kebijakan pengetahuan kebangsaan dan pengetahuan lainnya.
3. Seluruh Staff dan Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta yang telah membantu memberikan dorongan dan semangat penulis dalam menyusun skripsi ini.
4. Teman-teman Mahasiswa Program Studi Akuntansi angkatan tahun 2014, dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Teriring doa semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut diatas mendapat pahala yang berlipat dari Allah SWT. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat.

Yogyakarta, 09 April 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Batasan Penelitian	7
1.4 Tujuan Penelitian	8
1.5 Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Hasil Penelitian Terdahulu	9
2.2 Landasan Teori	11
2.2.1 Kinerja Keuangan	11
2.2.2 Pengukuran Kinerja Keuangan	21
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	25
3.2 Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data	26

3.3 Lokasi Penelitian	26
3.4 Teknik Pengambilan Data	26
3.5 Teknik Pengolahan Data	28
3.6 Teknik Analisa Data	33

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil LSM PKBI DIY	36
4.2 Hasil Penelitian	46
4.2.1 Pengukuran Kinerja Keuangan PKBI Bantul Tahun 2017 Dari Segi Ekonomis	47
4.2.2 Pengukuran Kinerja Keuangan PKBI Bantul Tahun 2018 Dari Segi Ekonomis	57
4.2.3 Kinerja Keuangan Ditinjau Dari Segi Efektivitas	66
4.3 Kinerja Keuangan Ditinjau Dari Segi Efisiensi	71
4.4 Pembahasan Kinerja Keuangan PKBI Bantul Periode tahun 2017-2018...	75

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A Kesimpulan	77
B Saran	78
DAFTAR PUSTAKA.....	80

ABSTRAK

ANALISIS KINERJA KEUANGAN DENGAN PENDEKATAN VALUE FOR MONEY DI PKBI BANTUL

Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik tersebut telah dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efektif, dan efisien. Akuntabilitas publik juga terkait dengan kewajiban untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan mengenai apa yang telah, sedang, dan direncanakan akan dilaksanakan organisasi publik. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari sisi *output* yang dihasilkan saja, akan tetapi harus mempertimbangkan *input*, *output*, dan *outcome* secara bersama-sama. Manfaat analisis kinerja keuangan pada organisasi sektor publik antara lain: meningkatkan efektivitas pelayanan publik, meningkatkan mutu pelayanan publik, menurunkan biaya pelayanan publik karena efisiensi dan penghematan *input*, alokasi belanja yang berorientasi pada kepentingan publik, dan meningkatkan kesadaran atas penggunaan uang publik, demi akuntabilitas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya kinerja keuangan PKBI Kabupaten Bantul periode 2017-2018 berdasarkan metode menggunakan rasio efektifitas pada PKBI Kabupaten Bantul periode 2017-2018 mengalami fluktuasi. Pengukuran efektifitas pada semua program yang ada di PKBI Kabupaten Bantul periode 2017-2018, dapat diketahui dapat diketahui bahwa kegiatan program Penyusunan pengendalian evaluasi PKBI, Pembinaan usaha social ekonomi produktif, Penyelenggaraan distribusi raskin, Penanganan penyelesaian bayi, Pengelolaan Website, Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi dan program Penatausahaan keuangan dan asset merupakan kegiatan dengan tingkat ekonomis tertinggi yaitu sebesar 98%. Kegiatan dengan tingkat ekonomis terendah ada pada Penyediaan beras penyangga yaitu sebesar 38%.

Kata Kunci : Kinerja Keuangan, Value For Money, PKBI Bantul

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengukuran kinerja sangat diperlukan untuk menilai akuntabilitas organisasi dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik dan tepat sasaran. Oleh karena itu pengukuran kinerja adalah faktor penting di dalam suatu organisasi, termasuk juga untuk organisasi sektor publik. Menurut Robertson, 2002 dalam Mahsun, (2013: 25) Pengukuran kinerja (performance measurement) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas: efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa; kualitas barang dan jasa (seberapa baik barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan dan sampai seberapa jauh pelanggan terpuaskan); hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan; dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan.

Pengukuran kinerja organisasi sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. Pertama, untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam pemberian pelayanan publik. Kedua, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga, untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan (Mardiasmo, 2009: 11).

Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Bab I Ketentuan Umum pasal 3 menyebutkan poin-poin yang menjadi Ketentuan Umum Keuangan Negara yaitu Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Oleh karena itu, setiap penyelenggara Negara wajib mengelola keuangan Negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Pengelola keuangan Negara mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Sesuai dengan amanat Pasal 23 C Undang-Undang Dasar, Undang-Undang tentang Keuangan Negara telah menjabarkan aturan pokok yang ditetapkan Undang-Undang Dasar tersebut kedalam asas-asas umum dalam pengelolaan keuangan negara, seperti asas tahunan, asas umum, asas kesatuan, dan asas spesialisasi maupun asas-asas sebagai pencerminan best practices (penerapan kaidah-kaidah yang baik) dalam pengelolaan keuangan negara.

Dalam konteks organisasi pemerintahan, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi kepada publik dan konstituen lainnya yang menjadi pemangku kepentingan (*stakeholder*) (Mahmudi, 2007: 9). Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik tersebut telah dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efektif, dan efisien. Akuntabilitas publik juga terkait dengan kewajiban untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan mengenai apa yang telah, sedang, dan direncanakan akan dilaksanakan organisasi publik. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang public tersebut telah dibelanjakan, akan

tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang public tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien, dan efektif (*value for money*).

Ada beberapa alat dalam pengukuran kinerja, antara lain menggunakan metode *Balance Score Card* dan metode *Value for Money*. *Value For Money* adalah suatu konsep untuk menilai kinerja suatu organisasi sektor publik yang tidak hanya di tinjau dari aspek keuangan saja, tetapi menggunakan aspek non keuangan untuk menilai tingkat keberhasilan suatu program kerja sektor publik. Konsep *value for money* merupakan konsep untuk mengukur ekonomi, efektivitas dan efisiensi kinerja program, kegiatan dan organisasi. Konsep *value for money* adalah konsep yang penting dalam organisasi sektor publik sehingga sering kali disebut dengan inti dari pengukuran kinerja sektor publik.

Manfaat *value for money* pada organisasi sektor publik menurut Renyowijoyo (2008: 9) antara lain: meningkatkan efektivitas pelayanan publik, meningkatkan mutu pelayanan publik, menurunkan biaya pelayanan publik karena efisiensi dan penghematan *input*, alokasi belanja yang berorientasi pada kepentingan publik, dan meningkatkan kesadaran atas penggunaan uang publik, demi akuntabilitas.

Menurut Halim dan Kusufi (2013:132), *value for money* mengandung arti sebagai penghargaan terhadap nilai uang. Hal ini berarti setiap rupiah harus dihargai secara layak dan digunakan sebagaimana mestinya. *value for money* merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari sisi output yang dihasilkan saja, akan tetapi harus mempertimbangkan input, output, dan outcome secara bersama-sama. Manfaat *value for money* pada organisasi sektor publik menurut Renyowijoyo (2012: 9) antara lain: meningkatkan efektivitas pelayanan publik, meningkatkan mutu pelayanan publik, menurunkan biaya pelayanan publik karena efisiensi dan penghematan input, alokasi belanja

yang berorientasi pada kepentingan publik, dan meningkatkan kesadaran atas penggunaan uang publik, demi akuntabilitas.

Salah satu LSM yang memberikan pelayanan kepada masyarakat adalah PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia), PKBI didirikan berlandaskan kepedulian terhadap keselamatan ibu dan anak. Negara Indonesia memiliki banyak PKBI yang tersebar kurang lebih 26 provinsi. PKBI yang tersebar di Indonesia yang memiliki program klinik kurang lebih ada 14 provinsi. Dalam melayani kesehatan seksual reproduksi dan reproduksi klien di klinik ternyata terdapat transaksi yang berkaitan dengan uang. Transaksi di klinik yang berkaitan dengan uang adalah penerimaan kas dari klien. Sedangkan pengeluaran kas dari klinik eluruhnya dikelola oleh PKBI DIY. Saat terjadi penerimaan kas dari klien, klinik akan mencatat transaksi penerimaan kas tersebut. Dalam mencatat penerimaan kas dari klien PKBI DIY sudah menggunakan sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi adalah suatu kegiatan yang terintegritas yang menghasilkan laporan di bentuk data transaksi biaya yang diolah dan disajikan sehingga menjadi sebuah laporan keuangan yang memiliki arti bagi pihak yang membutuhkan (Mardi 2014:4)

Pencatatan dan pelaporan penerimaan kas dapat diperoleh dari informasi yang ada pada sistem informasi akuntansi di suatu organisasi. Informasi yang berkualitas akan berguna bagi pengambilan keputusan suatu organisasi. Pengambilan keputusan yang tepat dari informasi yang berkualitas akan meningkatkan efektivitas kinerja dalam suatu organisasi. Pentingnya informasi yang berkualitas dalam suatu organisasi dapat diidentifikasi dari kesesuaian antara kebutuhan pemakainya dengan yang dihasilkan oleh Renstrada (Rencana Strategi Daerah). Apabila Renstrada (Rencana Strategi Daerah) yang ada tidak bisa memenuhi kebutuhan informasi dari pemakainya, maka diperlukan perbaikan sistem tersebut yang sesuai dengan kebutuhan dari pemakainya. Agar perbaikan Renstrada sesuai dengan kebutuhan dari pemakainya, maka

diperlukan analisis kebutuhan informasi pemakai. Analisis kebutuhan informasi pemakai ini harus dilakukan untuk mengatasi kekurangan dari renstrada yang berlaku, supaya renstrada yang baru dapat memenuhi kebutuhan informasi pemakainya.

Pada bulan Desember 2016 hingga Desember 2017, PKBI pusat yang berada di Jakarta memberikan kesempatan kepada PKBI yang memiliki klinik di 14 provinsi yang ada di Indonesia untuk memberikan segala kritik dan saran atas Renstrada yang sudah digunakan di klinik sejak 2012. Kritik dan saran tersebut bisa berupa kekurangan-kekurangan maupun masalah-masalah yang ada di Renstrada yang menghambat kinerja dari staf klinik. Segala kekurangan dan masalah dari Renstrada yang ada pada klinik di 14 provinsi akan disampaikan ke PKBI pusat. Selanjutnya segala kekurangan dan masalah tersebut akan dianalisis oleh PKBI pusat untuk dilakukan perencanaan dan pengembangan Renstrada yang baru. Perencanaan dan pengembangan Renstrada yang baru ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan informasi dari seluruh klinik PKBI di Indonesia.

Segala kekurangan maupun masalah dari Renstrada yang berlaku dapat diidentifikasi melalui karakteristik Renstrada. Karakteristik ini juga dapat mengidentifikasi informasi yang dihasilkan oleh Renstrada, apakah sistem informasi tersebut sudah sesuai dengan sasaran dan kebutuhan informasi yang harus dicapai oleh suatu organisasi atau belum. Berdasarkan hal-hal tersebut mendorong peneliti untuk menganalisis Renstrada penerimaan kas yang ada di PKBI Bantul, apakah sudah memadai sesuai sasaran dan kebutuhan informasi berdasarkan karakteristik Renstrada penerimaan kas pada PKBI Bantul. Analisis ini juga dilakukan untuk mengetahui segala kekurangan dan masalah dari Renstrada penerimaan kas yang ada. Segala kekurangan dan masalah tersebut dapat menjadi masukan untuk PKBI Pusat dalam melakukan perencanaan dan pengembangan Renstrada yang baru. Selain itu dengan mempertimbangkan bahwa belum pernah

ada penelitian di PKBI Bantul maka peneliti melakukan penelitian tentang “Pengukuran Kinerja Keuangan Berbasis *Value For Money* Di PKBI Bantul Periode Tahun 2017- 2018” studi kasus pada kantor PKBI Bantul.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana kinerja keuangan berbasis *Value For Money* di PKBI Bantul periode tahun 2017-2018?

1.3 Batasan Penelitian

Agar penelitian ini tidak terlalu melebar maka pada penelitian ini peneliti memberi batasan. Adapun batasan penelitian ini adalah ingin mendapatkan gambaran yang jelas dan mendalam mengenai kinerja keuangan PKBI Bantul Periode 2017-2018.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: untuk mengukur kinerja keuangan berbasis *Value For Money* PKBI Bantul periode tahun 2017-2018 sudah memadai sesuai dengan Renstrada (Rencana Strategi Daerah)

1.5 Manfaat Penelitian

- a. Bagi PKBI Bantul

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi PKBI Bantul, supaya masukan tersebut dapat menjadi pertimbangan dan membantu PKBI Pusat dalam melakukan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian keuangan.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi sebuah penerapan dan sarana pengembangan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan ke dalam praktik yang sesungguhnya yaitu mengenai pengelolaan dana keuangan dengan Renstrada yang berkaitan dengan penerimaan kas.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Erdiani Silele, Harijanto dan Rudi Pusung (2012) melakukan penelitian yang berjudul “Evaluasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Studi Kasus Pada SD Inpres 4 Desa Akediri Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa (1) Perencanaan dana BOS sudah sesuai Juknis BOS 2015 karena dilihat dari Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang pendanaan pendidikan. Pendanaan pendidikan dari dana BOS yang didapatkan SD Inpres 4 halmahera barat yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) untuk tahun 2016 adalah Rp.134.400.000/tahun, -(2) Pelaksanaan dana BOS tidak sesuai dengan Juknis BOS 2015 khususnya dalam penyusunan seharusnya setelah hasil dari evaluasi rapat bersama maka selanjutnya penyusunan RKAS disahkan oleh SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera barat, pengalokasian dana BOS sudah sesuai dengan Juknis BOS 2015, dan untuk penyaluran dana BOS tidak sesuai dengan Juknis BOS 2015, mengalami keterlambatan dalam beberapa proses pencairan (3) Penggunaan dana BOS tidak sesuai dengan Juknis BOS 2015, hanya memenuhi 11 komponen pembiayaan dari 13 komponen yang dibiayai dana BOS, hal itu disebabkan karena hanya disesuaikan dengan kebutuhan sekolah saja dan (4) Pelaporan pertanggungjawaban dana BOS tidak sesuai Juknis 2015 untuk laporan intern khususnya dalam transparansi penggunaan dana BOS karena tidak membuat papan spanduk informasi dan untuk laporan ekstern khususnya pada opname kas dan berita acara pemeriksaan kas tidak ada serta pembukuan dana BOS tidak lengkap.

Penelitian yang dilakukan oleh Yusia Prajoko (2014) yang berjudul “*Rancangan Evaluasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah(Bos) Di Sdn Kaloran*”. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Kebijakan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Tahun 2015 Studi Pada Sekolah Dasar Negeri Kaloran IV sudah berjalan dengan baik. Pelaksanaan program tersebut sudah berjalan cukup efektif karena sudah hampir mencapai hasil yang diharapkan, kemudian dari segi efisiensi juga sudah baik bahwa sekolah sudah mengupayakan penggunaan dana BOS dengan sebaik mungkin, ini dapat dilihat dari adanya rencana kegiatan anggaran sekolah yang sudah di rencanakan untuk melaksanakan kegiatan sekolah dengan menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah.

Elisabeth Swasti (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “*Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Pengeluaran Kas Studi Kasus di Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)*”. Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi pengeluaran kas di PKBI DIY belum sepenuhnya sesuai dengan teori. Ketidaksesuaian tersebut dapat dilihat dari penggunaan dokumen cek yang tidak dilakukan atas nama perusahaan penerima pembayaran dan tidak adanya catatan register cek pada pengeluaran kas dengan cek.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Kinerja Keuangan

a. Kinerja

Menurut Mahsun, (2013: 25) Pengertian kinerja (*performace*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam

mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategi *planning* suatu organisasi. Sedangkan menurut Bahua, (2016: 51) kinerja adalah hasil kerja atau prestasi kerja seseorang dalam suatu organisasi, baik organisasi pemerintah maupun swasta.. Menurut Moehariono (2014: 95), kinerja atau *performance* merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi.” Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu.

Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolok ukurnya. Dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan, kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi atau organisasi dihubungkan dengan visi yang diemban oleh suatu organisasi.

Dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja merupakan suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Dari kedua definisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah suatu efektivitas dan efisiensi operasional suatu organisasi, bagian organisasi dan

karyawannya dalam mencapai tujuan. Mulyadi (2014: 235) juga mengatakan bahwa terdapat tiga macam ukuran yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja secara kuantitatif, yaitu :

- 1) Ukuran kinerja tunggal (*single criteria*), adalah ukuran kinerja yang hanya menggunakan 1 macam ukuran untuk menilai kinerja manajer.
- 2) Ukuran kinerja beragam (*multiple criteria*), adalah ukuran kinerja yang menggunakan berbagai macam ukuran
- 3) Ukuran kriteria gabungan (*composite criteria*), adalah ukuran yang menggunakan berbagai macam ukuran, memperhitungkan bobot
- 4) masing-masing ukuran dan menghitung rata-ratanya sebagai ukuran menyeluruh kinerja manajer (Mulyadi, 2014: 235).

b. Pengertian Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan menurut Rudianto (2013: 189) adalah hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh manajemen perusahaan dalam menjalankan fungsinya mengelola aset perusahaan secara efektif selama periode tertentu. Kinerja keuangan sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengetahui dan mengevaluasi sampai dimana tingkat keberhasilan perusahaan berdasarkan aktivitas keuangan yang telah dilaksanakan. Kinerja keuangan perusahaan adalah prestasi dibidang keuangan yang unsur-unsurnya berkaitan dengan pendapatan, operasional secara menyeluruh, struktur hutang dan hasil investasi. Kinerja keuangan perusahaan merupakan suatu gambaran mengenai kondisi perubahan yang meliputi posisi keuangan serta hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang tercermin dalam laporan keuangan.

Kinerja keuangan perusahaan sangat ditentukan oleh kualitas kebijakan manajemen yang diambil dalam upaya mencapai tujuan organisasi, sehingga untuk mengukur kinerja keuangan perlu dilaksanakannya analisis laporan keuangan. Oleh karena itu agar laporan keuangan mampu memberikan informasi sebagaimana yang diinginkan oleh perusahaan, perlu dilakukan analisis dan interpretasi atas data-data yang terangkum dalam laporan keuangan tersebut sebagai langkah awal untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut. Penilaian kinerja keuangan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen agar dapat memenuhi kewajibannya terhadap para penyandang dana dan juga untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan perusahaan serta potensi perusahaan dalam menjalankan usahanya secara financial ditunjukkan dalam laporan keuangan.

Kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Hal ini sangat penting agar sumber daya digunakan secara optimal dalam menghadapi perubahan lingkungan.

Penilaian kinerja keuangan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen agar dapat memenuhi kewajibannya terhadap para penyandang dana dan juga untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

c. Manfaat Penilaian Kinerja Keuangan

Manfaat dari penilaian kinerja keuangan adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengukur prestasi yang dicapai oleh suatu organisasi dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatannya.
- 2) Untuk menilai kontribusi suatu bagian dalam pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan.
- 3) Dapat digunakan sebagai dasar penentuan strategi perusahaan untuk masa yang akan datang.
- 4) Memberi petunjuk dalam pembuatan keputusan dan kegiatan organisasi pada umumnya dan divisi atau bagian organisasi pada khususnya. Sebagai dasar penentuan kebijaksanaan penanaman modal agar dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan.

d. Tujuan Pengukuran Kinerja

Menurut Mahmudi (2013:14), tujuan pengukuran kinerja adalah sebagai berikut:

- 1) Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi

Penilaian kinerja berfungsi sebagai tonggak (*milestone*) yang menunjukkan tingkat ketercapaian tujuan dan juga menunjukkan apakah organisasi berjalan sesuai arah atau menyimpang dari tujuan yang ditetapkan. Jika terjadi penyimpangan dari arah yang semestinya, pimpinan dengan cepat dapat melakukan tindakan koreksi dan perbaikan.

- 2) Menyediakan sarana pembelajaran pegawai

Pengukuran kinerja merupakan pendekatan sistematis dan terintegrasi untuk memperbaiki kinerja organisasi dalam rangka mencapai tujuan strategis

organisasi dan mewujudkan visi dan misinya. Sistem pengukuran kinerja bertujuan untuk memperbaiki hasil dari usaha yang dilakukan oleh pegawai dengan mengaitkannya terhadap tujuan organisasi. Pengukuran kinerja merupakan sarana untuk pembelajaran pegawai tentang bagaimana seharusnya mereka bertindak, dan memberikan dasar dalam perubahan perilaku, sikap, skill, atau pengetahuan kerja yang harus dimiliki pegawai untuk mencapai hasil kerja terbaik. Hanya dengan pengukuran kinerja seseorang dapat diketahui bahwa ia telah bekerja dengan baik atau tidak. Proses pengukuran dan penilaian kinerja akan menjadi sarana pembelajaran bagi semua pegawai organisasi melalui refleksi terhadap kinerja masa lalu, evaluasi kinerja saat ini, identifikasi solusi terhadap permasalahan kinerja saat ini dan membuat keputusan-keputusan untuk perbaikan kinerja yang akan datang.

3) Memperbaiki kinerja periode-periode berikutnya

Pengukuran kinerja dilakukan sebagai sarana pembelajaran untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Penerapan sistem pengukuran kinerja dalam jangka panjang bertujuan untuk membentuk budaya berprestasi (*achievement culture*) di dalam organisasi. Budaya kinerja atau budaya berprestasi dapat diciptakan apabila sistem pengukuran kinerja mampu menciptakan atmosfer organisasi sehingga setiap orang dalam organisasi dituntut untuk berprestasi. Untuk menciptakan atmosfer itu diperlukan perbaikan kinerja secara terus-menerus. Kinerja saat ini harus lebih baik dari kinerja sebelumnya, dan kinerja yang akan datang harus lebih baik daripada sekarang. Memberikan pertimbangan yang sistematis dalam pembuatan keputusan pemberian penghargaan (*reward*)

dan hukuman (*punishment*). Pengukuran kinerja bertujuan memberikan dasar sistematis bagi manajer untuk memberikan *reward*, misalnya kenaikan gaji, tujuan, dan promosi, atau *punishment* misalnya pemutusan kerja, penundaan promosi, dan teguran.

4) Memotivasi pegawai

Pengukuran kinerja bertujuan meningkatkan motivasi pegawai. Dengan adanya pengukuran kinerja yang dihubungkan dengan manajemen kompensasi, maka pegawai yang berkinerja tinggi akan memperoleh *reward*. *Reward* tersebut memberikan motivasi pegawai untuk berkinerja lebih tinggi dengan harapan kinerja yang tinggi akan memperoleh kompensasi yang tinggi.

5) Menciptakan akuntabilitas publik

Pengukuran kinerja merupakan salah satu untuk mendorong terciptanya akuntabilitas publik. Pengukuran kinerja menunjukkan seberapa besar kinerja manajerial dicapai, seberapa bagus kinerja finansial organisasi, dan kinerja lainnya yang menjadi dasar penilaian akuntabilitas. Kinerja tersebut harus diukur dan dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja. Pelaporan informasi kinerja tersebut sangat penting baik bagi pihak internal maupun eksternal.

e. Tahap-tahap dalam Menganalisis Kinerja Keuangan

Menurut Fahmi, (2013: 173) Secara umum ada 5 (lima) tahap dalam menganalisis kinerja keuangan suatu perusahaan:

- a. Melakukan review terhadap data laporan keuangan Review disini dilakukan dengan tujuan agar laporan keuangan yang sudah dibuat tersebut sesuai

dengan penerapan kaidah-kaidah yang berlaku umum dalam dunia akuntansi, sehingga dengan demikian hasil laporan keuangan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

- b. Melakukan perhitungan penerapan metode perhitungan di sini adalah disesuaikan dengan Kondisi dan permasalahan yang sedang dilakukan sehingga hasil dari perhitungan tersebut akan memberikan suatu kesimpulan sesuai dengan analisis yang diinginkan.
- c. Melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan yang telah diperoleh Metode yang paling umum dipergunakan untuk melakukan perbandingan ini ada dua yaitu:
 - 1) *Time series analysis*, yaitu membandingkan secara antar waktu atau antar periode, dengan tujuan itu nantinya akan terlihat secara grafik.
 - 2) *Cross sectional approach*, yaitu melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan rasio-rasio yang telah dilakukan antara satu perusahaan dan perusahaan lainnya dalam ruang lingkup yang sejenis yang dilakukan secara bersamaan. Dari hasil penggunaan kedua metoda ini diharapkan nantinya akan dapat dibuat satu kesimpulan yang menyatakan posisi perusahaan tersebut berada dalam kondisi sangat baik, baik, sedang/normal, tidak baik, dan sangat tidak baik.
- d. Melakukan penafsiran (*interpretation*) terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan Pada tahap ini analisis melihat kinerja keuangan perusahaan adalah setelah dilakukan ketiga tahap tersebut selanjutnya dilakukan penafsiran untuk

melihat apa-apa saja permasalahan dan kendala-kendala yang dialami oleh perbankan tersebut.

- e. Mencari dan memberikan pemecahan masalah (solution) terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan. Pada tahap terakhir ini setelah ditemukan berbagai permasalahan yang dihadapi maka dicarikan solusi guna memberikan suatu input atau masukan agar apa yang menjadi kendala dan hambatan selama ini dapat terselesaikan.

2.2.2 Pengukuran Kinerja Keuangan

a. Pengertian

Menurut Mahmudi (2013: 83) mengemukakan bahwa pengukuran kinerja untuk mengukur ekonomi, efisien, dan efektivitas suatu kegiatan, program, dan organisasi. dapat membantu pihak manajemen dalam melakukan pengambilan keputusan yang lebih baik. Indikator menunjukkan, memberikan indikasi atau memfokuskan perhatian pada bidang yang relevan sekaligus memberikan informasi dalam rangka mengukur tingkat akuntabilitas public. Menurut Mardiasmo, dalam jurnal Putra (2015) *Value for Money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Ada Tiga elemen utama: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia, di mana pengertian dari masing-masing elemen tersebut:

1) Ekonomi

Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga terendah.

2) Efisien

Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Efisien adalah pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah. Untuk mencapai keluaran tertentu.

3) Efektivitas

Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengemukakan bahwa efektivitas merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

b. Indikator Pengukuran

Tuntutan masyarakat dalam *Value for Money* adalah ekonomis (hemat) dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien dalam arti bahwa penggunaan/pengorbanannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif (berhasil guna) dalam arti pencapaian tujuan dan sasaran. Peranan indikator kinerja pada *Value for Money* adalah untuk menyediakan informasi sebagai pertimbangan untuk pembuatan keputusan (Mardiasmo, 2009: 130). Mardiasmo (2009) juga membagi indikator *Value for Money* menjadi dua, yaitu:

1) Indikator alokasi biaya (ekonomis dan efisiensi)

Ekonomis artinya pembelian barang dan jasa dengan tingkat kualitas tertentu pada harga terbaik (*spending less*). Efisiensi artinya *output* tertentu dapat dicapai dengan sumber daya yang serendah-rendahnya (*spending well*).

2) Indikator kualitas pelayanan (efektivitas)

Efektivitas artinya kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan (*spending wisely*).

c. Manfaat Implementasi Metode

Penerapan konsep *Value for Money* dalam pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik tentunya memberikan manfaat bagi organisasi itu sendiri maupun masyarakat. Manfaat yang dikehendaki dalam pelaksanaan *Value for Money* pada organisasi sektor publik yaitu: ekonomis (hemat cermat) dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya, dan efektif (berhasil guna) dalam mencapai tujuan dan sasaran (Mahmudi 2013: 80). Manfaat lain dari implementasi konsep *Value for Money* antara lain:

- 1) Meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran.
- 2) Meningkatkan mutu pelayanan publik.
- 3) Menurunkan biaya pelayanan publik.
- 4) Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik.
- 5) Meningkatkan kesadaran akan uang publik (*public costs awareness*) sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik.

Dari berbagai manfaat yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan Value for Money dalam pengukuran kinerja organisasi sektor publik sangat membantu suatu instansi pemerintah agar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan tepat dan sesuai sasaran sehingga terciptanya mutu pelayanan yang baik dengan penggunaan sumber daya yang ekonomis dan efisien.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, karena mengungkap fenomena-fenomena atau masalah-masalah berdasarkan atas logika keilmuan. Penelitian deskriptif kualitatif menurut Mukhtar (2013:29) adalah sebuah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan sebuah fakta empiris secara objektif ilmiah dengan berdasarkan pada logika keilmuan, prosedur, dan didukung oleh metodologi dan teoritis yang sesuai disiplin keilmuan yang ditekuni. Menurut Mukhtar (2013:29) penelitian deskriptif kualitatif pada hakikatnya menggunakan data sebagai acuan dalam penelitian. Data dalam penelitian kualitatif terbagi atas dua hal yaitu data primer dan data sekunder. Keduanya harus ditemukan oleh peneliti pada saat melakukan penelitian.

Penelitian ini menyajikan analisis terhadap fenomena melalui kata-kata, bukan angka-angka. Hasil penelitian merupakan gambaran dari fakta yang ditemukan di lapangan yang akan diolah secara lebih dalam dan terperinci. Dalam penelitian ini, penulis ingin mendapatkan gambaran yang jelas dan mendalam mengenai kinerja keuangan PKBI Bantul Periode 2017-2018 sudah memadai sesuai dengan Renstrada (Rencana Strategi Daerah).

3.2 Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data

Data primer yang digunakan adalah yang berasal dari hasil wawancara dapat ditulis atau direkam. Adapun yang diwawancarai oleh peneliti berkaitan dengan penelitian ini adalah Kepala keuangan PKBI Bantul.

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PKBI Bantul. Dengan pertimbangan sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian yang telah dirumuskan, maka objek yang paling sesuai adalah PKBI Bantul, adapun alasan pengambilan tempat penelitian tersebut karena PKBI Bantul yang telah lama beroperasi, disamping ketersediaannya data yang diperlukan dalam penelitian ini.

3.4 Teknik dan Pengambilan Data

1) Wawancara

Gorden dalam Herdiansyah (2010: 118) mengatakan “wawancara merupakan percakapan antara dua orang yang salah satunya bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi untuk suatu tujuan tertentu”. Wawancara merupakan suatu cara mendapatkan informasi secara langsung kepada informan. Wawancara yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini terdiri dari dua tahap. Tahap pertama yaitu tahap persiapan, peneliti membuat pedoman wawancara yang disusun berdasarkan teori yang peneliti gunakan serta sesuai dengan fokus penelitian ini. Pedoman wawancara yang telah disusun, ditunjukkan kepada yang lebih ahli dalam hal ini adalah dosen pembimbing penelitian untuk memberikan masukan dan selanjutnya peneliti

mempersiapkan diri untuk melakukan wawancara. Peneliti selanjutnya berkoordinasi dengan subyek penelitian yaitu anggota PKBI Bantul, Kepala PKBI Bantul beserta Sekertarisnya serta Bendahara PKBI Bantul. Untuk itu sebelum wawancara dilaksanakan peneliti bertanya kepada subjek tentang kesiapannya untuk diwawancarai. Setelah subjek bersedia untuk diwawancarai, peneliti membuat kesepakatan dengan subjek tersebut mengenai waktu dan tempat untuk melakukan wawancara.

Tahap kedua yaitu tahap pelaksanaan, peneliti membuat kesepakatan dengan subjek mengenai waktu dan tempat untuk melakukan wawancara berdasarkan pedoman yang dibuat. Pelaksanaan wawancara dilakukan dengan peneliti mendatangi subyek penelitian sesuai dengan yang disepakati sebelumnya. Wawancara dilakukan dengan cara dicatat langsung oleh peneliti. Setelah wawancara dilakukan dengan para subyek penelitian, peneliti memindahkan hasil catatan tangan ke dalam komputer untuk ditampilkan dalam hasil penelitian. Selanjutnya peneliti melakukan analisis data dan interpretasi data sesuai dengan langkah-langkah yang dijabarkan pada bagian metode analisis data di akhir bab ini. Setelah itu peneliti mengambil kesimpulan berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan.

2) Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data-data tertulis. Dokumen yang dimaksud yaitu berupa tugas pokok dan fungsi Kepala PKBI Bantul beserta jajarannya.

3.5 Teknik Pengolahan Data

Setelah data diperoleh dari lapangan terkumpul maka tahap berikutnya ialah mengolah data tersebut. Adapun teknik yang digunakan dalam pengolahan diatas sebagaimana yang disebutkan adalah:

1. Editing

Editing yaitu teknik mengolah data dengan cara meneliti kembali data yang telah diperoleh melalui wawancara maupun dokumentasi untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan. Tahap editing yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini menyajikan hasil wawancara berupa kalimat-kalimat yang kurang baku disajikan dengan menggunakan kalimat baku dan bahasa yang mudah dipahami.

2. Interpretasi

Interpretasi merupakan upaya untuk memperoleh arti dan makna yang lebih mendalam dan luas terhadap hasil penelitian yang sedang dilakukan. Pembahasan hasil penelitian dilakukan dengan cara meninjau hasil penelitian secara kritis dengan teori yang relevan dan informasi akurat yang diperoleh di lapangan. Interpretasi yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pembahasan hasil penelitian mengenai pengukuran kinerja keuangan PKBI Bantul periode 2017-2018 sudah memadai sesuai dengan Renstrada (Rencana Strategi Daerah).

3. Indikator Pengukuran

i. Indikator

Tuntutan masyarakat dalam *Value for Money* adalah ekonomis (hemat) dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien dalam arti bahwa

penggunaan/pengorbanannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif (berhasil guna) dalam arti pencapaian tujuan dan sasaran. Peranan indikator kinerja pada *Value for Money* adalah untuk menyediakan informasi sebagai pertimbangan untuk pembuatan keputusan (Mardiasmo, 2009: 130). Mardiasmo (2009) juga membagi indikator *Value for Money* menjadi dua, yaitu:

1) Indikator alokasi biaya (ekonomis dan efisiensi)

Ekonomis artinya pembelian barang dan jasa dengan tingkat kualitas tertentu pada harga terbaik (*spending less*). Efisiensi artinya *output* tertentu dapat dicapai dengan sumber daya yang serendah-rendahnya (*spending well*).

2) Indikator kualitas pelayanan (efektivitas)

Efektivitas artinya kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan (*spending wisely*).

ii. Manfaat Metode

Penerapan konsep *Value for Money* dalam pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik tentunya memberikan manfaat bagi organisasi itu sendiri maupun masyarakat. Manfaat yang dikehendaki dalam pelaksanaan *Value for Money* pada organisasi sektor publik yaitu: ekonomis (hemat cermat) dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya, dan efektif (berhasil guna) dalam mencapai tujuan dan sasaran (Mahmudi 2013: 80).

Manfaat lain dari implementasi konsep *Value for Money* antara lain:

- 1) Meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran.

- 2) Meningkatkan mutu pelayanan publik.
- 3) Menurunkan biaya pelayanan publik.
- 4) Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik.
- 5) Meningkatkan kesadaran akan uang publik (*public costs awareness*) sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik.

Dari berbagai manfaat yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan Value for Money dalam pengukuran kinerja organisasi sektor publik sangat membantu suatu instansi pemerintah agar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan tepat dan sesuai sasaran sehingga terciptanya mutu pelayanan yang baik dengan penggunaan sumber daya yang ekonomis dan efisien.

iii. Langkah-langkah Pengukuran

1) Pengukuran Ekonomi

Mengukur tingkat kehematan dari pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan organisasi sektor publik. Pengukuran tingkat ekonomi memerlukan data-data anggaran pengeluaran dan realisasinya. Berikut formula untuk mengukur tingkat ekonomi sebagai berikut: Mahsun, (2013: 186) merumuskan tingkat ekonomi sebagai berikut:

$$\text{Ekonomi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Anggaran Pengeluaran}} \times 100\%$$

Kriteria ekonominya adalah

- 1) jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($x < 100\%$) berarti ekonomis.
- 2) Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($x = 100\%$) berarti ekonomi berimbang.
- 3) Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($x > 100\%$) berarti tidak ekonomis.

2) Pengukuran Efektivitas

Efektivitas menggambarkan tercapainya sasaran program dan kegiatan. Suatu kegiatan (program) dinyatakan efektif, jika realisasi kinerja (keluaran) kegiatan (program) lebih besar atau sama dengan rencana kinerja (keluaran) kegiatan (program). Suatu kegiatan dinyatakan tidak efektif jika realisasi kinerja (keluaran) kegiatan lebih kecil daripada rencana kinerja (keluaran) kegiatan (Ritonga, 2014:53).

Jadi secara matematis, efektivitas dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Kinerja (Keluaran) Kegiatan}}{\text{Rencana Kinerja (Keluaran) Kegiatan}}$$

3.6 Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan yang dilakukan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Dalam hal ini peneliti menganalisis data yang dihasilkan melalui wawancara terhadap subyek penelitian, sehingga peneliti dapat memecahkan pokok persoalan yang timbul dalam penelitian ini.

Selanjutnya peneliti dapat menyimpulkan beberapa pokok persoalan berikut pemecahan masalahnya juga peneliti dapat memberikan beberapa saran yang merupakan bagian dari solusi dalam memecahkan persoalan yang timbul dalam penelitian ini. Menurut Huberman dalam Mukhtar (2013:135) analisis data deskriptif kualitatif mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, ketiga jalur analisis data tersebut menjadi acuan dalam tulisan ini. Penelitian ini dinyatakan selesai jika data dalam kondisi jenuh, yaitu saat peneliti menanyakan kepada informan yang diwawancarai tentang informan lain yang direkomendasikan, jawabannya tetap berkisar pada informan-informan sebelumnya yang sudah penulis wawancara.

1. Reduksi Data

Reduksi data yaitu sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan. Reduksi data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah analisis yang menajam, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data mengenai pengelolaan dan keuangan PKBI Bantul pada tahun 2017 sudah memadai sesuai dengan Renstrada (Rencana Strategi Daerah).

2. Penyajian Data (Display Data)

Hasil reduksi data kemudian disusun dan disajikan dalam bentuk teks naratif-deskriptif. Tahap penyajian data berisi tentang pengolahan data setengah jadi yang sudah seragam dalam bentuk tulisan dan sudah memiliki alur tema yang jelas ke dalam suatu matriks kategorisasi sesuai tema-tema yang sudah dikelompokkan dan dikategorikan, serta akan memecah tema-tema tersebut ke dalam bentuk yang lebih konkret dan sederhana.

3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion)

Tahap ini adalah tahap akhir analisis data. Kesimpulan menjurus pada jawaban dari pertanyaan dalam rumusan masalah penelitian. Dalam konteks penelitian ini penulis menggunakan 4 indikator untuk mengetahui pengelolaan dan keuangan PKBI Bantul pada tahun 2017 sudah memadai sesuai dengan Renstrada (Rencana Strategi Daerah).

Kemudian berdasarkan hasil temuan dilapangan melalui wawancara dan dokumentasi dilapangan yang dikaitkan dengan kesemua indikator tersebut maka penulis mendapati bahwa beberapa indikator pengukuran kinerja keuangan PKBI Bantul periode 2017-2018 sudah memadai sesuai dengan Renstrada (Rencana Strategi Daerah) belum berjalan dengan baik.

Untuk mengetahui validitas data peneliti menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber. triangulasi teknik yaitu untuk mengetahui atau menanyakan hal yang sama dengan teknik yang berbeda yaitu wawancara, dokumentasi.

Sedangkan triangulasi sumber dilakukan dengan cara menanyakan hal sama melalui sumber/informan yang berbeda dari pihak PKBI Bantul, jika sumber data memberikan data yang sama berarti data dikatakan kredibel. Berdasarkan hasil data tersebut sehingga penulis dapat menarik kesimpulan yang kemudian dipaparkan pada bagian kesimpulan dan saran.